



# LAPORAN

**MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN RENCANA AKSI (RENAKSI)  
TRIWULAN II  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI MALUKU**

---

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan adalah Dokumen Strategis yang memuat target, kegiatan, dan indikator kinerja untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan, mencakup peningkatan kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan/NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola, Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan, Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan, Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan Triwulan II oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk memantau capaian dan merumuskan langkah perbaikan, termasuk evaluasi kendala dan rekomendasi tindak lanjut.

Demikian Laporan ini dibuat atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ambon, 03 Juli 2025  
Kepala Dinas  
Kelautan dan Perikanan



**Erawan Asikin**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196905031995031003.

## **BAB. I PENDAHULUAN**

### 1.1. Latar belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawab yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi : komponen, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitanya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan Laporan Monev Rencana Aksi Triwulan II adalah tersususnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Rencana Aksi atas pencapaian kinerja Tahun 2025 dan tujuan disusunnya Laporan Rencana Aksi, yaitu :

1. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Monitoring dan Evaluasi Triwulan II Tahun 2025;
2. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada Triwulan II.

## **BAB.II RENCANA AKSI**

### **2.1. RENSTRA**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus membuat dokumen Perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tatanan perangkat daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku menyusun Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Rencana Strategis (RENSTRA) yang mengacu pada RPJMD dan memperhatikan tugas dan fungsi.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan formal yang disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun Sasaran dari Rencana Strategis Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang diampu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku adalah :

1. Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan;
2. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan efektif

## 2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai Strategi Organisasi .

Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan untuk periode 2025-2029 sesuai Perubahan Terakhir RENSTRA.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku seperti berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
1.	Mewujudkan tatakelola SD Organisasi yang handal untuk mendukung Penyelenggaraan Pembangunan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD
2.	Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Produksi Perikanan Budidaya

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/Sasaran
		Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)
3.	Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Efektif dan Efisien	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha) Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Pengawasan
4.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan Efisien	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%) Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)

### 2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan	3.000.000.000,-
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	511.435,90
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	236.000
	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	103,36
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	101
		Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)	40,4
3.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)	2,053.582,18
4.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)	100

		Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan (%)	90
--	--	---	----

Adapun Program Pendukung yang menunjang Sasaran Startegis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	29.160.411.924
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan	
3.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)	
4.	Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	12.916.833.000
5.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	
6.	Meningkatkan Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.048.632.000
	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	
7.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)	633.090.500
		Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Pengawasan	839.038.000
8.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-	

		Undangan (%)	
9.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)	2.760.430.000

#### 2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan Penjabaran lebih lanjut atas rencana Pelaksanaan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang dituangkan secara berkala (per bulan/triwulan). Adapun Rencana Aksi Triwulan II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja organisasi Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	B	-	

Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Kelautan dan Perikanan OPD Triwulan II belum ada karena harus dilakukan melalui evaluasi terhadap komponen-komponen manajemen kinerja yang terintegrasi. (Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan, dan Capaian kinerja).

NO.	SASARAN STARTEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
2.	Meningkatkan Produksi Perikanan	PAD sektor Kelautan dan Perikanan	1.500.000.000	1.250.000.000	
		Jumlah Produksi	250.000	253.000	

		Perikanan Tangkap			
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	80.000	77.23	

- a. Target PAD sektor Kelautan dan Perikanan pada Triwulan II dengan Target sebesar Rp. 1.500.000.000 dengan Realisasi Rp.1.250.000.000,-.
- b. Target Jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada Triwulan II berjumlah 250.000 dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 253.000.
- c. Target Jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada Triwulan II berjumlah 80.000 dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 77.23.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
3.	Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	50.00	55.84	
		Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	50.15	50.25	
		Angka Konsumsi Ikan (Kg / Kapita/Tahun)	20.00	20.15	

- a. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada Triwulan II dengan Target 50.00 dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 55.84;

- b. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi) pada Triwulan II dengan Target 50.15 dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 50.25;
- c. Angka Konsumsi Ikan pada Triwulan II dengan Target 20.00 dengan Realisasi pada Triwulan II sebesar 20.15;

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan PP.Kecil yang dikelola (Ha)	-	-	

Menghitung jumlah kawasan konservasi dilakukan dengan menjumlahkan total unit kawasan yang telah ditetapkan secara legal oleh pemerintah, baik di darat (terrestrial) maupun di perairan (laut/pesisir). Data ini biasanya dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN		KET.
			TARGET TW.II	REALIASASI TW.II	
5.	Terwujudnya Penegakan Regulasi yang kuat dan efektif	Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%)	-	-	
		Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-	40	45	

		Undangan (%)			
--	--	--------------	--	--	--

- a. Presentase Tingkat Pelayanan Publik (%) dilakukan melalui survei kepuasan yang didasarkan pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- b. Target Tingkat Kepatuhan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-Undangan pada Triwulan II sebesar 40% dengan Realisasinya 45%.

### **BAB. III. EVALUASI RENCANA AKSI**

### **3.1. Hasil Evaluasi Rencana Aksi**

Telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Rencana Aksi Trwiulan II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2025, sebagai realisasi akan pelaksanaan kinerja terhadap sasaran strategis, program, kegiatan dan subkegiatan yang diampu oleh masing-masing Pejabat Struktural , Fungsional dan Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, yang dapat dilihat pada Tabel :

### **3.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut**

a. Permasalahan

Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya perikanan yakni Meningkatkan Pendapatan Pelaku Utama Kelautan dan Perikanan, Mengoptimalkan Pengelolaan Sumberdaya Alam laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang efektif dan efisien serta Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan KP yang kuat dan efektif maka tidak ada Permasalahan yang mempengaruhi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

b. Tindak Lanjut

Semua Pelaksanaan Program dan Kegiatan sudah sesuai RENSTRA, Sasaran strategis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan

**BAB. IV. PENUTUP**

Dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi Kelautan dan Perikanan mencakup peningkatan kesejahteraan nelayan (Nilai Tukar Nelayan/NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi), Luasan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Terkelola, Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Perundang-Undangan, Pendapatan Asli Daerah Sektor Kelautan dan Perikanan, Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya dan Angka Konsumsi Ikan semuanya memenuhi target pada Triwulan II dan ada yang yang belum mencapai Target.



Rehabilitasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	0	Unit	4	Unit	1.519.278.890	0	1.788.000	370.614.603	372.402.603	25%	372.402.603	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rehabilitasi/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	1	Unit	1	Unit	1.411.378.890	0	332.310.603	332.310.603	24%	332.310.603	Dinas - Grup Pulau III	
Rehabilitasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperbaiki/Direhabilitasi	Unit	0	Unit	0	Unit	3.000.000	0	0	0	0%	0	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
<b>Program Pengelolaan Kelautan, Perairan dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Luas Kawasan Konservasi Perairan Perairan dan PP Kecil yang dikelola (Ha)</b>		100%	100%			<b>2.263.055 Ha</b>	<b>483.548.000</b>	<b>23.749.909</b>	<b>27.508.040</b>	<b>0</b>	<b>12%</b>	<b>42.908.040</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 MI di Luar Nelayan dan Gas Bumi	Pengelolaan dan pemertan wilayah perairan dan pulau-pulau kecil sesuai terdapat dengan baik sesuai dengan peruntukannya		100%	100%	100%		346.677.100	0	5.230.000	25.556.040	0	9%	30.788.040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Perencanaan dan Pemertan Puncak	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang Terlewat	Ha		Ha		Ha	142.827.500	0	2.280.000	3.780.000	-	4%	6.600.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Perencanaan dan Pemertan Puncak	Luas Kawasan Konservasi di Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang Terlewat	Ha		Ha	4	Ha	18.497.500	0	-	-	-	0%	-	Dinas - Grup Pulau III
Mitigasi Bencana Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Orang		Orang		Orang	3.850.000	2.950.000	-	-	-	77%	2.950.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengintegrasian Materi Teknik Perairan Perairan/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknik Perairan Perairan/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	199.999.600	-	-	21.778.040	-	11%	21.778.040	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Pembudayaan Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>Meningkatnya jumlah masyarakat perairan dan pulau-pulau kecil yang diberdayakan</b>		100%	100%			<b>336.870.900</b>	<b>0</b>	<b>18.519.909</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-</b>	<b>6%</b>	<b>20.469.909</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		Orang		Orang	80.980.900	0	-	-	-	0%	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang		Orang	100	Orang	49.938.900	0	-	-	-	0%	-	Dinas - Grup Pulau III
Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok		Kelompok		Kelompok	18.950.000	0	-	-	-	0%	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Polikab Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Perairan dan Pulau-Pulau Kecil	Orang		Orang		Orang	33.040.000	0	-	-	-	0%	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Berikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok		Kelompok		Kelompok	203.900.000	18.519.909	1.950.000	-	-	10%	20.469.909	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Berikan Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok		Kelompok	15	Kelompok	200.000.000	0	18.519.909	-	-	9%	18.519.909	Dinas - Grup Pulau III
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)</b>		100%	100%			<b>11.054.721.000</b>	<b>22.130.000</b>	<b>1.348.488.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12%</b>	<b>1.370.618.114</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Nilai Tukar Nelayan / NTN (Poin)</b>													DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 MI	Meningkatnya Pengelolaan Perikanan Tangkap di Laut		100%	100%	100%		10.783.287.200	0	7.260.000	1.325.178.114	-	12%	1.322.438.114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	Dokumen		Dokumen		Dokumen	146.770.000	0	7.260.000	12.170.000	-	12%	14.430.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	20.400.000	0	5.250.000	5.250.000	-	25%	5.250.000	Dinas - Grup Pulau III
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 MI	Unit		Unit		Unit	104.165.120.000	1.313.008.114	-	-	-	12%	1.313.008.114	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Penelitian Iain Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Rekomendasi Iain Usaha Perikanan</b>		100%	100%			<b>39.700.000</b>	<b>0</b>	<b>5.230.000</b>	<b>5.230.000</b>	<b>0</b>	<b>13%</b>	<b>5.230.000</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rekomendasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penguatan Iain untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Jumlah Perencanaan dan Pelaksanaan Penyelenggaraan dan Penguatan Iain untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Rekomendasi		Rekomendasi	1	Rekomendasi	5.600.000	0	2.950.000	2.950.000	-	52%	2.950.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Jumlah data dan informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal perangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 MI	Dokumen		Dokumen	3	Dokumen	34.050.000	0	2.280.000	2.280.000	-	7%	2.280.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Penetapan Lokasi Pengembangan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>Terselenggaranya pelayanan dan operasional kepulauan perikanan</b>		100%	100%			<b>202.423.800</b>	<b>0</b>	<b>4.140.000</b>	<b>16.560.000</b>	<b>-</b>	<b>10%</b>	<b>20.700.000</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit		Unit		Unit	0	0	-	-	-	0%	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Penguasaan Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Layanan		Layanan	2	Layanan	202.423.800	4.140.000	16.560.000	-	-	10%	20.700.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan</b>		100%	100%			<b>21.780.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>-</b>	<b>86%</b>	<b>12.250.000</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	10.750.000	0	6.750.000	6.750.000	-	6%	6.750.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penelitian surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Rekomendasi		Rekomendasi	1	Rekomendasi	11.000.000	0	5.500.000	5.500.000	-	50%	5.500.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerakan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Kapal Perikanan</b>		100%	100%			<b>7.540.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Peryaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Dokumen		Dokumen	0	Dokumen	7.540.000	0	-	-	-	0%	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)</b>						<b>1.948.022.000</b>	<b>0</b>	<b>52.029.760</b>	<b>86.148.000</b>	<b>0</b>	<b>7%</b>	<b>138.197.760</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Penelitian Iain Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Perikanan Budidaya Perikanan</b>		100%	100%			<b>270.450.000</b>	<b>0</b>	<b>34.219.760</b>	<b>6.240.000</b>	<b>-</b>	<b>15%</b>	<b>40.459.760</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Penetapan Iain Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Peryaratan dan Prosedur Penetapan Iain Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Disetujui	Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi	203.850.000	28.639.760	900.000	-	-	14%	29.539.760	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penetapan Peryaratan dan Prosedur Penetapan Iain Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Peryaratan dan Prosedur Penetapan Iain Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Disetujui	Rekomendasi		Rekomendasi		Rekomendasi	200.000.000	28.639.760	-	-	-	14%	28.639.760	Dinas - Grup Pulau III
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut, Berasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen		Dokumen	6	Dokumen	66.800.000	0	5.580.000	5.340.000	-	16%	10.920.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Disetujui	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	10.800.000	0	900.000	3.600.000	-	42%	4.500.000	Dinas - Grup Pulau III
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		100%	100%			<b>1.677.372.000</b>	<b>0</b>	<b>79.928.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6%</b>	<b>97.738.000</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	15.810.000	0	3.780.000	3.780.000	-	24%	3.780.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit		Unit	1.160.125.000	0	-	-	-	0%	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemertan Kawasan Perairan dan Pulau-Pulau Kecil di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit		Unit	2	Unit	400.807.000	14.550.000	64.578.000	-	-	20%	79.128.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Terjadi Sehat	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	34.090.000	0	9.150.000	9.150.000	-	27%	9.150.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pemertan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dilakuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidayaan Ikan di Kawasan Konservasi yang Dilakuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Orang		Orang	40	Orang	64.540.000	0	3.240.000	4.200.000	-	9%	5.600.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Program Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Tingkat Kesehatan Pulau, Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Perundang-undangan (%)</b>						<b>711.460.000</b>	<b>0</b>	<b>24.439.393</b>	<b>68.259.000</b>	<b>-</b>	<b>13%</b>	<b>92.698.393</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MI</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap, Budidaya, dan Ruang Laut</b>		100%	100%			<b>628.445.000</b>	<b>0</b>	<b>24.439.393</b>	<b>63.699.000</b>	<b>-</b>	<b>14%</b>	<b>88.138.393</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 MI	Jumlah Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 MI	Dokumen		Dokumen		Dokumen	1.800.000	0	-	-	-	0%	-	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Usaha perikanan ikan dan/atau usaha perikanan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Usaha perikanan ikan dan/atau usaha perikanan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Dokumen		Dokumen		Dokumen	162.830.000	4.680.000	30.869.000	-	-	22%	35.549.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan Usaha perikanan ikan dan/atau usaha perikanan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Usaha perikanan ikan dan/atau usaha perikanan ikan sampai dengan 12 MI sesuai kewenangan provinsi	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	48.300.000	900.000	3.600.000	-	-	9%	4.500.000	Dinas - Grup Pulau III
Pengawasan usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Dokumen		Dokumen		Dokumen	278.323.000	19.199.393	11.990.000	-	-	11%	31.109.393	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pengawasan usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Jumlah usaha pemertan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	141.068.000	19.199.393	19.199.393	-	-	14%	19.199.393	Dinas - Grup Pulau III
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok		Kelompok		Kelompok	185.492.000	600.000	20.880.000	-	-	12%	21.480.000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (PKMAMAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok		Kelompok	12	Kelompok	68.612.000	0	11.630.000	-	-	17%	11.630.000	Dinas - Grup Pulau III
<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerakan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan</b>		100%	100%			<b>83.015.000</b>	<b>0</b>	<b>4.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5%</b>	<b>4.560.000</b>	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

